

## V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

### A. SIMPULAN

Sesuai dengan hasil olah data dan studi literatur yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Maka dari itu, penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita melalui Belanja Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2004 – 2020” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Kuningan pada tahun 2004 – 2020 secara rata-rata berada pada kategori “Sangat Kurang” dengan nilai sebesar 8,31 persen. Hal itu berarti bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kuningan tergolong rendah atau “Kurang Mandiri” sehingga membuktikan terdapat ketergantungan daerah yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat, di mana tercermin dari rendahnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya Dana Perimbangan yang diterima.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal dengan koefisien sebesar  $-0,258048$ , sedangkan positif terhadap Belanja Operasi dengan koefisien sebesar  $0,004784$ . Adapun Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal dan Operasi, dengan koefisien sebesar  $0,274280$  untuk Belanja Modal dan  $1,157857$  untuk Belanja Operasi. Hal itu menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh penting dalam menyokong Belanja Modal dan Operasi Kabupaten Kuningan, sehingga

semakin menguatkan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

3. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PDRB per Kapita dengan koefisien sebesar  $-4,14$ . Adapun Belanja Operasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB per Kapita dengan koefisien sebesar  $5,67$ . Hal itu menunjukkan bahwa Belanja Operasi Kabupaten Kuningan berkontribusi dalam menyokong peningkatan PDRB per Kapita, padahal di satu sisi belanja ini berfokus kepada operasional pemerintahan. Kondisi ini terjadi dikarenakan tingginya alokasi Belanja Operasi dan rendahnya alokasi Belanja Modal di Kabupaten Kuningan.

## **B. IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan dan kesimpulan, berikut adalah implikasi yang dapat dijadikan sebagai bahan literasi, evaluasi, usulan, dan pertimbangan bagi Kabupaten Kuningan:

1. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kuningan melalui Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) tergolong “Sangat Kurang” yang berarti “Kurang Mandiri” dalam sisi pendapatan daerah. Hal itu berarti menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan merupakan komponen yang rendah dalam menyokong pendapatan daerah secara keseluruhan. Untuk itu, Kabupaten Kuningan harus mengupayakan dengan konsisten dalam pengoptimalan berbagai sektor daerah, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan dapat meningkat dan proporsi PAD dalam pendapatan daerah dapat lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Dengan demikian, Kabupaten Kuningan dapat menjadi daerah yang

mandiri dalam sisi pendapatan daerah yang diterima. Lebih lanjut, berdasar pada bagian-bagian yang menunjang PAD Kabupaten Kuningan, lain-lain PAD yang sah merupakan bagian yang paling tinggi dan konsisten dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, diikuti pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Maka dari itu secara lebih spesifik, dalam upaya pengoptimalan dari peningkatan PAD Kabupaten Kuningan, lain-lain PAD yang sah merupakan bagian yang harus dipertahankan agar senantiasa konsisten dan meningkat dari tahun ke tahun untuk menunjang PAD Kabupaten Kuningan.

2. Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam terwujudnya tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Kabupaten Kuningan, salah satu di antaranya adalah menjamin pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal merupakan bagian yang berperan dalam tujuan tersebut. Untuk itu, Kabupaten Kuningan harus mengoptimalkan alokasi belanja modal pada setiap periode, dikarenakan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan produktivitas masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat juga dapat mengalami peningkatan yang tercermin dari nilai PDRB per Kapita. Dengan demikian, dalam menunjang peningkatan PDRB per Kapita Kabupaten Kuningan, pendapatan daerah harus mendorong peningkatan PAD dan mengoptimalkan alokasi belanja daerah melalui belanja modal.

### C. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan data penelitian yang terbatas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan, dan situs resmi Kabupaten Kuningan, menyebabkan penelitian mengalami penyesuaian jumlah sampel, di mana yang semula berjumlah 20 tahun (2001 – 2020) berubah menjadi 17 tahun (2004 – 2020). Dengan demikian sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan memperbesar jumlah sampel dan/atau memperbanyak jumlah daerah agar ketersediaan data penelitian tidak terbatas.
2. Jumlah data penelitian yang sedikit, yaitu sebanyak 17 sampel dengan lima variabel yang diolah menggunakan Regresi Linier Berganda, menyebabkan model regresi dalam penelitian ini tidak lolos Uji Asumsi Klasik, di mana pada persamaan Belanja Modal dan Belanja Operasi terdapat gejala multikolinieritas, sedangkan pada persamaan PDRB per Kapita terdapat gejala autokorelasi. Dengan demikian sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menetapkan jumlah sampel yang besar dan menetapkan alat analisis yang sesuai agar dapat meminimalisir kendala saat pengolahan data penelitian.